



Pemerataan yang Tidak Merata: Infrastruktur dan Kesenjangan Sosial Pemicu Krisis Nasionalisme

Nadia Khoerotunnisa¹, Tazkiyatul Qolbi², Adellia Asfarah Kurniawan³, Alifia Salsabila Qurratunnisa⁴, Mawar⁵

^{1,2,3,4,5} *Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta*

Email : nadiakhoerotunnisa10@gmail.com¹, tazkistc@gmail.com²,
adeliaasfara20@gmail.com³, alifiaquratunnisa@gmail.com⁴, mawar@umj.ac.id⁵

Article Info

Article history:

Received April 06, 2025

Revised April 21, 2025

Accepted April 28, 2025

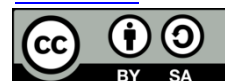
Keywords:

*Infrastructure Equity,
Nationalism, Social Disparity,
Administrative Comparison*

ABSTRACT

The disparity in infrastructure development and social disparities in Indonesia, especially in the 3T (Disadvantaged, Frontier, and Outermost) regions such as Papua, Maluku, and Aceh, have triggered a nationalism crisis that threatens the integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI). The main problems identified are unequal access to infrastructure, education, and the economy, which strengthen feelings of injustice and trigger the emergence of separatist movements at the national and international levels. This study aims to analyze the factors causing development inequality in Indonesia and compare them with China's development equity strategy, in order to offer relevant solutions for Indonesia. The method used is a literature study by reviewing various scientific sources, statistical data, and relevant case studies. The results of the study show that, although Indonesia has recorded economic growth in several regions, inter-regional inequality is still high due to limited infrastructure, access to education, and regional fiscal capacity. In contrast, China has been able to reduce regional disparities through an integrated national strategy, investment incentives, and consistent long-term planning. This study recommends the need for reform of equitable development policies in Indonesia by emulating best practices from China, especially in terms of strengthening regional fiscal capacity, developing connectivity infrastructure, and integrating national and regional planning to strengthen nationalism and prevent national fragmentation.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received April 06, 2025

Revised April 21, 2025

Accepted April 28, 2025

Kata Kunci :

*Pemerataan Infrastruktur,
Nasionalisme, Kesenjangan sosial*

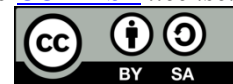
ABSTRAK

Ketimpangan pembangunan infrastruktur dan kesenjangan sosial di Indonesia, khususnya di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) seperti Papua, Maluku, dan Aceh, menjadi pemicu krisis nasionalisme yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Masalah utama yang diidentifikasi adalah tidak meratanya akses terhadap infrastruktur, pendidikan, dan ekonomi, yang memperkuat perasaan ketidakadilan dan memicu munculnya gerakan separatis di tingkat nasional maupun internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab ketimpangan pembangunan di Indonesia serta membandingkannya dengan strategi pemerataan pembangunan di China, guna menawarkan solusi yang relevan bagi Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi literatur



dengan mengkaji berbagai sumber ilmiah, data statistik, dan studi kasus yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun Indonesia telah mencatat pertumbuhan ekonomi di beberapa wilayah, ketimpangan antarwilayah masih tinggi akibat keterbatasan infrastruktur, akses pendidikan, dan kapasitas fiskal daerah. Sebaliknya, China mampu menekan kesenjangan wilayah melalui strategi nasional terintegrasi, insentif investasi, dan perencanaan jangka panjang yang konsisten. Studi ini merekomendasikan perlunya reformasi kebijakan pemerataan pembangunan di Indonesia dengan mencontoh praktik terbaik dari China, khususnya dalam hal penguatan kapasitas fiskal daerah, pembangunan infrastruktur konektivitas, serta integrasi perencanaan nasional dan daerah untuk memperkuat nasionalisme dan mencegah fragmentasi bangsa.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Nadia Khoerotunnisa

Universitas Muhammadiyah Jakarta

E-mail: : nadiakhoerotunnisa10@gmail.com

PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu hal penting bagi pertumbuhan ekonomi untuk di wilayah Indonesia. Seperti pemerintah yang membangun Ibu Kota Nusantara (IKN) berharap IKN dapat bisa meningkatkan persentase ekonomi Indonesia, Diharapkan IKN akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang akan memicu pembangunan infrastruktur dan bisnis di wilayah sekitar. Hal ini akan berdampak positif pada peningkatan pendapatan masyarakat (Alzulini, 2024). Akan tetapi dalam pembangunan infrastruktur harus adanya pemerataan pembangunan agar tidak terjadinya kesenjangan sosial antara wilayah, misalnya wilayah 3T (tertinggal, terluar, terdepan) contohnya seperti Maluku dan Papua, masih banyak masyarakat Maluku dan Papua yang merasakan kurangnya perhatian pemerintah untuk wilayahnya dari fasilitas yang kurang dan juga bantuan seperti pembangunan jembatan, jalan alternatif dan lain sebagainya. Bahkan hal ini bisa memicu perpecahan terhadap kedaulatan di Indonesia (Herman, 2025).

Contohnya pada 25 April 2025 di New York pada saat acara United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII) yang diselenggarakan oleh PBB. Contohnya, pada 25 April 2025 di New York, pada saat acara United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII) yang diselenggarakan oleh PBB, terjadi insiden yang menarik perhatian internasional. Mereka merupakan warga negara Indonesia, mengenakan pakaian adat, mengangkat poster bertuliskan "Free Maluku", "Free Papua", dan "Free Aceh" di ruang Sidang Majelis Umum PBB.





Sumber: Kompas TV

Pada gambar tersebut, mereka mengidentifikasi diri sebagai perwakilan dari kelompok separatis Aceh Sumatra National Liberation Front (ASNLF) dan West Papua Liberation Organization (WPLO). Hal ini dinilai tindakan penyalahgunaan yang dapat merusak kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karena menyerukan kemerdekaan bagi wilayah Indonesia di forum internasional adalah tindakan yang tidak menunjukkan jiwa nasionalisme.

Kemudian hal ini mengutip dari (Kompas, 2025), Insiden ini menyoroti pentingnya menjaga etika dan tujuan dari forum internasional seperti UNPFII, yang seharusnya menjadi ruang untuk diskusi konstruktif mengenai pemberdayaan masyarakat adat, bukan untuk menyuarakan agenda separatis. Penting bagi semua pihak untuk menghormati kedaulatan negara dan menjaga integritas forum internasional (Adit, 2025).

Solusi dari permasalahan ini sangat diperhatikan untuk ancaman dan masalah tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini karena dapat mengancam stabilitas negara. Jika tidak segera tercapai, penyelesaian akan menyebabkan konflik yang semakin parah dan memicu perpecahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Situasi atau konflik seperti ini dapat terjadi berkali-kali, menyebabkan perpecahan bangsa dan mengurangi rasa nasionalisme masyarakat. (1) Ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah salah satu masalah utama yang memperparah keadaan ini. Tidak meratanya infrastruktur, pendidikan, dan ekonomi menyebabkan kesenjangan sosial yang tajam, terutama di wilayah terutama pada daerah Maluku dan Papua. Masyarakat setempat akan merasa pemerintah pusat mengabaikan mereka dan tidak memberikan perhatian yang sama kepada masyarakat di daerah lain. Ketidakpercayaan dan kekecewaan terhadap negara meningkat akibat perasaan tertinggal ini. Nasionalisme secara bertahap menghilang dan digantikan oleh rasa kedaerahan ketika rasa keadilan sosial tidak tercapai. Hal ini dapat menyebabkan gerakan fragmentasi dan meningkatkan risiko konflik vertikal dan horizontal. Oleh karena itu, untuk meningkatkan semangat kebangsaan dan menjaga keutuhan NKRI, pemerintah harus segera mengambil tindakan nyata untuk mencapai pemerataan pembangunan.

Dalam mengatasi masalah yang terus berlanjut pemerintah perlu menerapkan suatu program seperti dengan negara berkembang lainnya seperti China. Pemerintah China menetapkan target pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen pada 2025 dengan janji menciptakan 12 juta lapangan kerja baru di kota-kota. Hal ini menunjukkan fokus pada pemerataan kesempatan ekonomi yang menjadi bagian dari semangat nasionalisme pembangunan (Voa, 2025). Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional China (sejalan dengan RPJPN Indonesia sebagai perbandingan), terdapat strategi pemerataan pembangunan yang mencakup peningkatan kapasitas pembiayaan dan manajemen investasi berkualitas untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah, termasuk pembangunan infrastruktur konektivitas seperti jalan, pelabuhan, dan jaringan kereta api. Ini menunjukkan kesadaran nasional untuk membangun seluruh wilayah secara merata demi persatuan dan kemajuan bersama.

Aspek	Indonesia	China
Cakupan Wilayah	Negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, banyak daerah terpencil dan sulit dijangkau.	Negara kontinental dengan wilayah luas, terdiri dari daerah perkotaan, pedesaan, barat, timur, dan tengah.



Tantangan Pemerataan	Ketimpangan antara Pulau Jawa dan luar Jawa, daerah timur Indonesia masih tertinggal dibanding barat.	Ketimpangan antara daerah pesisir timur yang maju dan daerah barat/tengah yang tertinggal.
Strategi Pemerataan	Pembangunan jalan, jembatan, bandara, pelabuhan; program Dana Desa; kerja sama internasional (misal dengan China).	Program “Western Development Strategy” (WDS) untuk meningkatkan investasi infrastruktur di daerah barat.
Hasil Pemerataan	Pembangunan masih terpusat di Jawa dan kawasan barat; ketimpangan infrastruktur antarwilayah masih tinggi.	Investasi infrastruktur di daerah barat meningkat signifikan sejak WDS; ketimpangan berkurang secara bertahap.
Kerja Sama Internasional	Banyak proyek infrastruktur besar mendapat dukungan dana dan teknologi dari China.	Memiliki kapasitas pembiayaan dan teknologi sendiri, namun tetap membuka peluang investasi asing.
Dampak Ekonomi	Infrastruktur memacu pertumbuhan ekonomi lokal, namun manfaat belum merata di seluruh wilayah.	Infrastruktur mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal, meningkatkan produktivitas dan konektivitas.

Indonesia menghadapi tantangan besar dalam pemerataan pembangunan infrastruktur karena kondisi geografis dan ketimpangan antarwilayah, sementara China telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam mengurangi ketimpangan pembangunan infrastruktur melalui strategi nasional seperti Wireless Distribution System (WDS). Oleh karena itu, Indonesia perlu menerapkan setiap kebijakan yang telah diterapkan seperti di negara China untuk bisa mengatasi masalah yang terjadi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Dalam artikel ini, metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur. Metode ini melibatkan penelusuran berbagai sumber tertulis yang relevan. Data yang dikumpulkan terdiri dari konsep, teori, dan kisah yang ditemukan dalam literatur yang dapat diandalkan, seperti buku, artikel, jurnal ilmiah, dan publikasi online. Studi ini bertujuan untuk menyelidiki dan mempelajari teori-teori nasionalisme dari sudut pandang sosial, politik, dan historis, sehingga dapat digunakan untuk memberikan landasan analisis untuk membandingkan perkembangan dan penerapan nilai-nilai nasionalisme di kedua negara tersebut yaitu Indonesia dan China. Dengan demikian, studi literatur ini berfungsi sebagai landasan untuk menjelaskan bagaimana faktor-faktor seperti latar belakang, kebijakan pemerintah, dan kondisi sosial-politik memengaruhi corak nasionalisme di negara tersebut.

Adapun pula penelitian terdahulu yang menjadi landasan kami untuk mengkaji permasalahan ini terkhususnya di Indonesia. Yang pertama ialah Hilda Nur Alfiana, dkk. Yang berjudul “Krisis Identitas Nasional sebagai Tantangan Generasi Muda di Era Globalisasi”. Jurnal ini menyimpulkan bahwa krisis identitas nasional merupakan tantangan serius bagi generasi muda Indonesia di era globalisasi. Jika tidak diatasi

, kondisi ini dapat membahayakan keberlangsungan bangsa. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman generasi muda terhadap identitas nasional, baik melalui pendidikan formal maupun informal, serta pemanfaatan teknologi secara bijak agar nilai-nilai budaya bangsa tetap lestari di tengah arus globalisasi.



Yang kedua ialah Jesika Ritonga, dkk yang berjudul “Meningkatkan Rasa Cinta Tanah Air terhadap Indonesia Melalui Pemahaman Identitas Nasional Bangsa dan Penanaman Sikap Nasionalisme Pada Siswa SMP Negeri 39 Medan”. Penelitian menyimpulkan bahwa pemahaman siswa SMP Negeri 39 Medan tentang identitas nasional masih perlu ditingkatkan. Rendahnya pemahaman ini berpotensi menurunkan rasa nasionalisme dan kecintaan terhadap tanah air. Penulis merekomendasikan agar guru dan pihak sekolah lebih aktif dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan melalui pembelajaran yang kontekstual, pembiasaan, serta kegiatan yang melibatkan siswa secara langsung dalam mengenal dan mencintai identitas nasional Indonesia. Upaya ini penting untuk menjaga keutuhan bangsa dan mencegah krisis identitas pada generasi muda.

Yang ketiga penelitian milik Elisha Samantha Dewi Manurung, dkk dengan judul “Identity Crisis As A Threat among Indonesian Young Generations” Dalam artikel ini, penulis memberikan solusi dan saran yang cukup relevan untuk mengatasi krisis nasionalisme, Pertama, penulis menyarankan bahwa reorientasi pendidikan karakter di sekolah sangat penting. Kedua, penting untuk memanfaatkan media sosial sebagai alat untuk menyebarkan patriotisme. Media sosial sangat akrab dengan anak muda, sehingga dapat digunakan sebagai alat untuk kampanye digital yang mempromosikan cinta budaya lokal, tokoh-tokoh yang menginspirasi bangsa, dan konten edukatif yang mendukung identitas nasional. Keempat penelitian milik Raziq Hussain dengan judul “The Resurgence of Nationalism in a Globalized World: Factors, Implications, and Solutions” Jika nasionalisme digunakan untuk memperkuat identitas bangsa tanpa menutup diri dari dunia luar, itu tidak selalu bertentangan dengan globalisasi. Secara keseluruhan, solusi yang ditawarkan masuk akal dan sesuai dengan keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan. Penulis ingin menunjukkan bahwa nasionalisme dapat diatasi secara konstruktif, bukan dengan menolaknya sepenuhnya tetapi dengan meningkatkan semangat kebangsaan secara positif dan inklusif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Papua merupakan salah satu wilayah dengan kekayaan sumber daya alam paling melimpah di Indonesia, namun potensi ini belum mampu dikonversi menjadi kesejahteraan bagi masyarakat lokal secara merata dan berkelanjutan. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 menunjukkan bahwa Provinsi Papua mencatat angka kemiskinan tertinggi secara nasional, dengan persentase mencapai 26,03%, sementara Papua Barat berada di angka 20,49%. Tingginya tingkat kemiskinan ini tidak dapat dilepaskan dari interaksi kompleks antara faktor sosial, ekonomi, dan geografis yang menghambat proses pembangunan di kawasan timur Indonesia tersebut (BBC Indonesia, 2023). Salah satu akar dari kemiskinan struktural ini adalah keterbatasan akses terhadap pendidikan dan infrastruktur dasar. Terutama di wilayah pedalaman Papua, masyarakat masih menghadapi hambatan geografis dan minimnya ketersediaan fasilitas pendidikan. Imbasnya, mayoritas penduduk usia produktif tidak memiliki jenjang pendidikan yang memadai, yang pada gilirannya berdampak langsung terhadap kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja formal yang tersedia.

Data dari tahun 2023 menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kerja di Papua berada di sektor informal, yakni sebesar 84,43%. Sektor ini identik dengan pendapatan yang tidak menentu, kurangnya perlindungan sosial, serta minimnya akses terhadap jaminan



ketenagakerjaan. Situasi ini diperparah dengan rendahnya tingkat pendidikan: lebih dari 665 ribu pekerja di Papua merupakan mereka yang tidak bersekolah atau belum pernah mengenyam pendidikan formal (Kumparan, 2023). Bahkan, jumlah pekerja yang hanya menyelesaikan pendidikan sampai tingkat SMA tercatat masih lebih rendah dibandingkan dengan kelompok yang tidak sekolah sama sekali. Sementara itu, hanya sekitar 170 ribu orang yang berhasil menempuh pendidikan tinggi (diploma atau universitas). Kondisi ini mencerminkan adanya ketimpangan struktural dalam sistem pembangunan manusia di Papua. Minimnya akses pendidikan menengah dan tinggi berkontribusi pada stagnasi kualitas sumber daya manusia (SDM), yang pada akhirnya menghambat produktivitas, inovasi lokal, dan keberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam perspektif pembangunan jangka panjang, rendahnya tingkat pendidikan bukan hanya menjadi konsekuensi dari kemiskinan, melainkan juga faktor penyebab yang memperkuat lingkaran setan kemiskinan tersebut.

Maluku: Pertumbuhan Tinggi, Ketimpangan Masih Nyata

Maluku mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi pada tahun 2024, yakni sebesar 6,52% (year-on-year), menjadikannya salah satu provinsi dengan laju pertumbuhan tercepat di kawasan timur Indonesia. Kontribusi utama pertumbuhan ini berasal dari sektor industri pengolahan, terutama pengolahan hasil perikanan, serta peningkatan ekspor hasil laut ke pasar domestik maupun internasional (Bank Indonesia Provinsi Maluku, 2024). Hal ini menunjukkan adanya pergeseran positif dari dominasi sektor primer menuju sektor sekunder yang berorientasi nilai tambah, didukung oleh kebijakan pemerintah daerah dalam mengembangkan sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan.

Pertumbuhan ekonomi tersebut belum sepenuhnya dinikmati secara merata oleh seluruh wilayah di provinsi Maluku. Ketimpangan pembangunan antarwilayah masih sangat terasa, terutama antara pusat pertumbuhan seperti Kota Ambon dan wilayah-wilayah kepulauan kecil yang tersebar secara geografis. Keterbatasan konektivitas antar pulau, baik dari segi transportasi laut, infrastruktur pelabuhan, hingga jaringan distribusi logistik, menghambat pergerakan barang dan jasa, serta memperbesar kesenjangan harga kebutuhan pokok. Selain itu, keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan energi di wilayah terluar memperkuat ketimpangan struktural. Dengan demikian, tantangan utama ke depan adalah memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut dapat ditransformasikan menjadi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Maluku, termasuk mereka yang tinggal di daerah paling terpencil.

Aceh: Infrastruktur Tumbuh, Struktur Ekonomi Rentan

Sementara itu, Aceh mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,17% pada triwulan III tahun 2024, sebuah capaian yang mencerminkan tren pemulihan ekonomi daerah pascapandemi COVID-19. Penurunan angka pengangguran terbuka menjadi 5,75% menjadi indikator positif terhadap perbaikan pasar kerja di provinsi tersebut. Perbaikan ini terutama ditopang oleh peningkatan proyek-proyek infrastruktur yang dibiayai oleh pemerintah daerah maupun pusat, serta tumbuhnya sektor jasa, seperti kesehatan, pariwisata, dan pendidikan, yang mulai mengalami peningkatan permintaan seiring membaiknya mobilitas masyarakat (BPS Aceh, 2024). Akan tetapi, struktur ekonomi Aceh masih menunjukkan kerentanan yang cukup tinggi terhadap dinamika fiskal nasional. Hal ini disebabkan oleh ketergantungan yang besar terhadap



dana otonomi khusus (otsus), yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan daerah. Ketergantungan ini membuat Aceh memiliki fleksibilitas fiskal yang terbatas, sehingga sulit mengembangkan basis ekonomi yang mandiri. Di sisi lain, sektor ekspor yang belum berkembang optimal, terutama dalam sektor pertanian dan perikanan, membatasi potensi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Rendahnya nilai tambah dari komoditas unggulan, minimnya industrialisasi, serta kurangnya akses ke pasar global menjadi tantangan besar dalam mewujudkan transformasi ekonomi Aceh yang berkelanjutan.

China: Infrastruktur Tumbuh Pesat, Struktur Ekonomi Semakin Kokoh

Pada 2024, China mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang stabil di kisaran 5%, didorong oleh investasi masif dalam infrastruktur dan reformasi struktural untuk memperkuat ketahanan ekonomi, menurut laporan Xinhua pada Oktober 2024. Kebijakan stimulus ekonomi yang diluncurkan pemerintah China, termasuk alokasi dana sebesar 1 triliun yuan untuk proyek infrastruktur dan teknologi hijau, telah mempercepat pembangunan jaringan transportasi, pelabuhan modern, dan zona ekonomi digital. Program ini tidak hanya meningkatkan konektivitas domestik, tetapi juga memperluas pengaruh China dalam perdagangan global melalui Belt and Road Initiative (BRI). Misalnya, pengembangan koridor ekonomi baru, seperti jalur kereta cepat dan pelabuhan di Asia Tenggara, telah meningkatkan efisiensi rantai pasok global, yang berpotensi menguntungkan mitra dagang seperti Indonesia, termasuk Aceh. Wilayah-wilayah seperti Papua, Maluku, dan Aceh selama ini kerap mengalami perlambatan dalam pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi dibandingkan daerah-daerah strategis di Indonesia lainnya. Kondisi ini makin mencolok jika dibandingkan dengan China, yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi pesat di berbagai wilayah, termasuk daerah yang sebelumnya tertinggal. Perbedaan mencolok ini tidak hanya muncul karena faktor geografis, tetapi juga karena strategi kebijakan yang diterapkan secara konsisten dan agresif oleh pemerintah Tiongkok sejak awal era reformasi. Salah satu kunci keberhasilan China adalah pembentukan Zona Ekonomi Khusus (Special Economic Zones/SEZ) yang dimulai pada tahun 1980. Wilayah seperti Shenzhen, yang dulunya merupakan desa nelayan kecil, kini menjadi salah satu pusat teknologi dan manufaktur terbesar di dunia. Pemerintah pusat China memberikan berbagai insentif bagi investor, seperti pembebasan pajak, kemudahan perizinan, dan akses cepat ke infrastruktur strategis seperti pelabuhan dan bandara. Sementara itu, di Indonesia, pendekatan pembangunan kawasan ekonomi sering kali tidak didukung oleh infrastruktur pendukung yang memadai, terutama di wilayah-wilayah seperti Papua atau Maluku yang secara geografis terpencil. Selain itu, desentralisasi fiskal di China memainkan peran penting. Pemerintah daerah diberikan keleluasaan mengelola keuangan dan menentukan prioritas pembangunan lokal. Ini berbeda dengan Indonesia, di mana desentralisasi sering kali tidak diiringi dengan kapasitas fiskal dan manajerial yang cukup di tingkat daerah, terutama di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Pemerintah lokal di China bahkan menggunakan mekanisme keuangan inovatif seperti Local Government Finance Vehicles (LGFV) untuk membiayai pembangunan infrastruktur besar-besaran, termasuk jalan tol, jalur kereta cepat, dan jaringan logistik digital. China juga dikenal memberikan subsidi strategis, bukan hanya untuk ekspor, tetapi juga untuk memperkuat kapasitas industri dalam negeri. Misalnya, sektor energi, bahan baku, serta manufaktur teknologi tinggi seperti mobil listrik (EV) dan chip mendapat insentif besar. Subsidi ini membuat biaya produksi di China kompetitif



dan mendukung industrialisasi yang cepat. Kebijakan seperti Made in China 2025 dan investasi besar-besaran dalam riset dan pengembangan (R&D) menjadi motor penggerak transformasi ekonomi berbasis inovasi. Yang tak kalah penting adalah perencanaan pembangunan jangka panjang China yang disusun dalam Rencana Lima Tahunan (Five-Year Plan). Melalui strategi nasional ini, setiap wilayah diberikan peran dan target yang jelas dalam kontribusi terhadap ekonomi nasional. Pemerintah pusat juga secara aktif mendorong pemerataan pembangunan melalui program seperti “Go West” dan “Rise of Central China” untuk mempercepat kemajuan di wilayah barat dan tengah yang sebelumnya tertinggal.

Sebaliknya, di Indonesia, perencanaan pembangunan jangka panjang sering kali terputus karena pergantian pemerintahan. Selain itu, program-program seperti pembangunan kawasan timur Indonesia kerap terhambat oleh birokrasi, ketidaksesuaian regulasi pusat-daerah, dan keterbatasan anggaran. Papua, Maluku, dan Aceh memang memiliki kekayaan sumber daya alam, tetapi pengelolaan yang belum optimal, kurangnya infrastruktur, serta lemahnya integrasi ekonomi nasional menyebabkan potensi tersebut tidak termanfaatkan secara maksimal. Dibandingkan dengan China, pendekatan pembangunan Indonesia cenderung menyebar, tidak fokus pada akselerasi satu kawasan sebagai motor pertumbuhan yang bisa menggerakkan wilayah sekitarnya.

KESIMPULAN

Pemerataan pembangunan infrastruktur di Indonesia masih menghadapi tantangan besar, terutama di wilayah 3T (tertinggal, terluar, dan terdepan) seperti Papua, Maluku, dan Aceh. Ketimpangan infrastruktur dan akses pendidikan di wilayah-wilayah ini menyebabkan kesenjangan sosial yang tajam, memperkuat perasaan terpinggirkan, dan berpotensi menurunkan rasa nasionalisme masyarakat setempat. Contoh nyata dari ketimpangan ini terlihat pada tingginya tingkat kemiskinan di Papua, pertumbuhan ekonomi Maluku yang belum merata, serta ketergantungan fiskal Aceh terhadap dana otonomi khusus. Ketidakmerataan pembangunan ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga memicu munculnya gerakan separatisme dan krisis identitas nasional, sebagaimana tercermin dalam insiden di forum internasional seperti UNPFII.

Dibandingkan dengan China, Indonesia masih tertinggal dalam hal strategi pemerataan pembangunan. China berhasil mengurangi ketimpangan antarwilayah melalui kebijakan nasional yang terencana, desentralisasi fiskal yang efektif, dan investasi besar-besaran di sektor infrastruktur serta inovasi. Program-program seperti Zona Ekonomi Khusus dan Rencana Lima Tahunan secara konsisten mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah yang sebelumnya tertinggal, memperkuat struktur ekonomi nasional, dan meningkatkan rasa kebangsaan.

Untuk menjaga keutuhan NKRI dan memperkuat nasionalisme, Indonesia perlu meniru beberapa strategi kunci dari China, seperti perencanaan pembangunan jangka panjang yang konsisten, peningkatan kapasitas fiskal daerah, serta akselerasi investasi infrastruktur di wilayah 3T. Selain itu, penguatan pendidikan karakter dan pemanfaatan teknologi untuk menanamkan nilai-nilai nasionalisme pada generasi muda juga menjadi solusi penting dalam menghadapi tantangan globalisasi dan krisis identitas nasional. Pemerataan pembangunan yang berkeadilan adalah kunci untuk mengurangi ketimpangan sosial, mencegah fragmentasi bangsa.



DAFTAR RUJUKAN

- Adit. (2025). Insiden UNPFII dan Etika Internasional. Kompas.id.
- Alfiana, H. N., dkk. (2022). Krisis Identitas Nasional sebagai Tantangan Generasi Muda di Era Globalisasi. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 14(1), 45–58.
- Bank Indonesia Provinsi Maluku. (2024). Laporan Perekonomian Maluku Triwulan IV 2024. <https://www.bi.go.id>
- BBC Indonesia. (2023). Kemiskinan di Papua Masih Tertinggi Nasional. <https://www.bbc.com/indonesia>
- BPS Aceh. (2024). Pertumbuhan Ekonomi Aceh Triwulan III 2024. <https://aceh.bps.go.id>
- Herman. (2025). Pemerataan Infrastruktur dan Kedaulatan Negara. *Media Pembangunan Nasional*.
- Jesika Ritonga, dkk. (2023). Meningkatkan Rasa Cinta Tanah Air melalui Pemahaman Identitas Nasional dan Penanaman Sikap Nasionalisme. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(2), 112–120.
- Kompas. (2025). Forum UNPFII dan Ancaman Separatisme. <https://www.kompas.id>
- Kumparan. (2023). Mayoritas Tenaga Kerja di Papua Bekerja di Sektor Informal. <https://kumparan.com>
- Manurung, E. S. D., dkk. (2023). Identity Crisis as a Threat among Indonesian Young Generations. *Journal of Civic Education*, 8(1), 76–88.
- Raziq, H. (2021). The Resurgence of Nationalism in a Globalized World: Factors, Implications, and Solutions. *International Journal of Political Science*, 10(2), 99–110.
- Voa Indonesia. (2025). China Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen dan 12 Juta Lapangan Kerja. <https://www.voaindonesia.com>
- Xinhua. (2024). China Allocates 1 Trillion Yuan for Infrastructure and Green Tech Projects. Xinhua News Agency. <https://www.xinhuanet.com>